

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah salah satu penilaian kesehatan sebuah lembaga atau perusahaan. Maka, laporan keuangan menjadi penting untuk dibuat oleh lembaga atau perusahaan. Laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari bentuk pertanggung jawaban bagi pihak yang berkepentingan. Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna, dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan (Sri, 2020).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya. Menurut (Sufyati, 2021) laporan keuangan pada mulanya bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi selanjutnya sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut.

Lembaga amil zakat dan lembaga keuangan syariah pada perkembangannya yang pesat telah memikat banyaknya pihak untuk mengetahui lebih dalam tentangnya. Di tengah perkembangan yang pesat dari transaksi lembaga syariah, kebutuhan akuntansi syariah semakin meningkat. Akuntansi dalam proses pelaporan transaksi keuangan perusahaan harus dapat melacak seluruh kemajuan

transaksi yang sedang berlangsung. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang, sedangkan kegiatan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu (Haryono, 2003) Dalam mengelola dana zakat secara profesional dibutuhkan badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan penggalangan dana zakat hingga penyaluran. Semua ketentuan zakat diatur dalam syariah Islam, serta membutuhkan manajer zakat yang harus akuntabel dan transparan.

Laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atau media antara pengelola dan masyarakat. Agar dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dan terbagi ke dalam sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan merupakan tujuan dari laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Menurut (Rusdiana, 2018) laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah laporan yang memiliki ciri-ciri yang pertanggungjawaban dana publik, penyajiannya tepat waktu, adanya audit/respon pemerintah, adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal/8:27 dan diperjelas dalam Q.S An-Nisa/4:58. Kandungan kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa dengan menjalankan perintah yang telah disyariatkan dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan keburukan, terlebih jika mereka telah mengetahui bahwa amanah tersebut harus segera dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam ayat tersebut

mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain.

Pengelolaan keuangan yang amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik tentang sistem pengelolaan keuangan dengan bentuk berupa laporan keuangan adalah implementasi ayat tersebut. Dengan berdasar pada ayat tersebut, instansi dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di pusat maupun di daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Rusdiana, 2018). Sehingga, kualitas laporan keuangan tergantung bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dan digunakan.

Rencana kegiatan merupakan salah satu cara untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada Muzakki dan orang-orang yang berkepentingan (Permana, 2012). Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2010). Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudaya nya korupsi

sistematik. Untuk mengikis hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan instansi.

Laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai muzakki maupun muwakkif. Kemudian juga dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. IAI menyelesaikan PSAK ED Nomor 109 tentang akuntansi zakat, untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan administrasi satuan zakat (Tri, 2023)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi). Pengelolaan keuangan harus diikuti dengan tatakelola yang baik, antara lain mekanisme penyaluran dana bergulir yang professional, transparan dan akuntabel, penerapan prinsip manajemen yang baik dalam mengelola dana (Ahmad, 2011).

Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta financial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun islam (Sarwat, 2011). Dari sebagian harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain, ketika seorang muslim memiliki ekonomi yang lebih, maka berhak untuk menyisihkan harta yang dimilikinya untuk diberikan

kepada seseorang yang berhak menerimanya (mustahiq), yang merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama muslim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmana, 2022) menyatakan bahwa masih kurangnya profesionalisme pegawai BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya karena tidak ada pelatihan khusus, serta pelatihan hanya dilakukan sekali. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah diaudit oleh KAP, serta pada Tahun 2017 dan 2018 meraih peringkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada tahun 2019-2022 belum memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Hal itu mengindikasikan masih kurangnya kualitas laporan keuangan yang dilaporkan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Bisa dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berikut ini.

Tabel 1.1

Laporan Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Penghimpunan Dana Zakat
1	2017	3.845.953.165
2	2018	3.874.521.615
3	2019	5.718.989.439
4	2020	7.151.836.332
5	2021	6.345.753.646
6	2022	5.905.864.543

Sumber: *Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya*

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dikarenakan wabah covid-19. Namun meskipun demikian, tetap saja saldo dana yang berhasil terkumpul masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dan mampu diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hamsinar, 2017) yang berjudul “pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi (studi kasus Kabupaten Pinrang)”. Dengan hasil menunjukkan Partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
3. Apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk lebih menambah wawasan mengenai teori dan praktik zakat.
2. Bagi Lembaga zakat
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam hal pengelolaan dana zakat agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan pengambilan, pengolahan dan pendistribusian.
3. Bagi muzaki
Diharapkan dengan adanya penelitian ini para muzakki atau masyarakat sekitar dapat mengetahui kinerja lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG